

PROFIL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

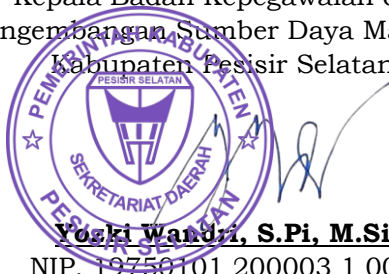
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Profil Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Edisi II Tahun 2024 dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini berisi informasi mengenai kondisi dan perkembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang tahun 2024. Gambaran keadaan Aparatur Sipil Negara tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan diagram, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

Akhirnya, kepada seluruh pembaca buku ini, kami sangat mengharapkan partisipasi berupa saran dan pendapat konstruktif yang dapat menjadi bahan perbaikan guna penyempurnaan penerbitan buku profil pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumber informasi yang akurat dan bermanfaat bagi semua pihak.

Painan, Februari 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



Yoski Wandri, S.Pi, M.Si
NIP. 19750101 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. METODE PENYUSUNAN.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM BKPSDM	6
KABUPATEN PESISIR SELATAN	
A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	6
B. VISI MISI KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	12
BAB III DESKRIPSI ASN KABUPATEN PESISIR SELATAN	
A. GAMBARAN UMUM ASN KABUPATEN PESISIR	17
SELATAN.....	
B. KOMPOSISI ASN KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	23
BAB IV PENUTUP	55
A. KESIMPULAN.....	55
B. SARAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	23
Tabel 2.	Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024.....	25
Tabel 3.	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2024.....	28
Tabel 4.	Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan Tahun 2024.....	30
Tabel 5.	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2024.....	32
Tabel 6.	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis jabatan Eselonering Tahun 2024.....	34
Tabel 7.	Jumlah PNS Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2024.....	37
Tabel 8.	Jumlah PPPK Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2024.....	42
Tabel 9.	Jumlah Mutasi ASN Tahun 2024.....	45
Tabel 10.	Jumlah ASN yang mencapai Batas Usia Pensiun Tahun 2024.....	46
Tabel 11.	Jumlah ASN Pensiun Atas Permintaan Sendiri Tahun 2024.....	47
Tabel 12.	Jumlah ASN Pensiun Janda Duda Tahun 2024.....	48
Tabel 13.	Jumlah PNS Pindah Masuk tahun 2024.....	50
Tabel 14.	Jumlah PNS Pindah Keluar Tahun 2024.....	51
Tabel 15.	Indek Profesionalitas ASN Tahun 2023-2024	52
Tabel 16.	Perbandingan Jumlah ASN antar Wilayah dan Rasio ASN per 1000 orang Penduduk	54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	24
Grafik 2.	Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024.....	26
Grafik 3.	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024.....	29
Grafik 4.	Jumlah PPPK berdasarkan golongan Tahun 2024.....	31
Grafik 5.	Jumlah ASN berdasarkan jenis jabatan Tahun 2024.....	33
Grafik 6.	Jumlah PNS berdasarkan jabatan Eselonering Tahun 2024.....	36
Grafik 7.	Jumlah PNS berdasarkan rentang usia Tahun 2024.....	40
Grafik 8.	Jumlah PPPK Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2024.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN memegang peran kunci dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah, pelayanan publik, serta pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyediaan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai profil ASN sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Buku Profil ASN memberikan gambaran yang jelas mengenai data dan informasi penting terkait ASN, seperti kualifikasi pendidikan, jabatan, serta distribusi ASN di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, profil ASN adalah alat untuk mendukung pengembangan karier ASN, penyusunan kebijakan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui buku profil ini, diharapkan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat lebih memahami peran dan kontribusi ASN dalam pembangunan negara. Buku ini juga diharapkan menjadi referensi yang berguna dalam merumuskan kebijakan-



kebijakan yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan ASN secara berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Profil Kepegawaian dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan pegawai baik dari segi jumlah pegawai yang ada meliputi jenis kelamin, golongan, tingkat Pendidikan, jabatan baik jabatan fungsional maupun jabatan struktural dan sebagainya yang dapat menggambarkan keadaan ASN Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penyusunan Profil Kepegawaian bertujuan agar data dan informasi kepegawaian terdokumentasi dan tersaji dengan baik.

Kelengkapan data dan informasi kepegawaian juga akan membantu dalam penyusunan rencana pengembangan pegawai serta penataan kelembagaan yang berorientasi pada Pengembangan Otonomi Daerah, sehingga tujuan Otonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk aparatnya di setiap daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan dapat tercapai dengan baik.

C. METODE PENYUSUNAN

Penyusunan Buku Profil Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini disusun dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data kepegawaian berasal dari data yang telah diperbarui dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg), yang disinkronkan dengan data pada aplikasi SIASN, serta dipadukan dengan data keuangan (penggajian) dari Sistem Informasi Manajemen Gaji yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk bulan Desember 2024.

2. **Penyajian Data**

Data yang disajikan dalam publikasi ini berupa data kuantitatif, dan disajikan dalam bentuk grafik dan data terpilah, sehingga dapat memberikan gambaran dan informasi yang lebih jelas.

3. **Konsep dan Defenisi**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan seorang PNS.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Medis adalah sekelompok jabatan fungsional pada rumpun jabatan fungsional kesehatan

Rasio PNS per 1.000 orang penduduk adalah jumlah PNS dikali dengan 1.000 dibagi dengan total penduduk.

Rasio Jenis Kelamin PNS adalah jumlah PNS berjenis kelamin laki-laki per 100 orang PNS berjenis kelamin perempuan.

Tingkat Pendidikan PNS adalah tingkat pendidikan terakhir yang tercatat dalam administrasi kepegawaian PNS yang bersangkutan. Bisa saja seorang PNS pernah menamatkan pendidikan yang lebih tinggi tetapi dalam administrasi kepegawaian masih tercatat pada tingkat pendidikan yang lebih rendah.

BAB II

GAMBARAN UMUM

BKPSDM KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan beberapa fungsi, meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi badan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

Berikut ini diuraikan tugas dan fungsi unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sekretaris Badan

Sekretaris memiliki tugas pokok untuk membantu Kepala Badan dalam menyiapkan konsep perumusan rencana, mengkoordinasikan, membagi tugas, memberikan petunjuk, serta menilai dan menganalisis pelaksanaan kegiatan di Sekretariat. Kegiatan ini meliputi urusan umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan, serta keuangan. Selain itu, Sekretaris juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan bidang-bidang yang berada di lingkup Badan, sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Badan membawahi dan dibantu oleh

berbagai sub bagian yang bertugas untuk memastikan kelancaran operasional dan administratif di seluruh unit kerja di bawah lingkup Badan.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas untuk mengelola ketatausahaan, pemanfaatan barang milik daerah, serta pengelolaan rumah tangga. Selain itu, sub bagian ini juga bertanggung jawab atas pembinaan dan pengurusan administrasi umum serta administrasi aparatur di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berperan penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan administratif berjalan dengan baik, mendukung kelancaran operasional Badan, serta menjaga hubungan yang efektif antar unit kerja. Hal ini mencakup pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kepegawaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan bertugas Menyusun serta mempersiapkan rencana dan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan

teknis perencanaan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan di lingkungan Badan, serta Menyusun anggaran program kerja. Selain itu, sub bagian ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan rutin, pembukuan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, pengelolaan perbendaharaan anggaran belanja Badan dan pembinaan administrasi keuangan pembangunan di Lingkungan Badan.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara

Tugas pokok Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, adalah menyusun rencana kebutuhan aparatur, pelaksanaan pengadaan aparatur, penyiapan proses pemberhentian, pengelolaan data dan informasi Aparatur baik data fisik maupun data elektronik, penyiapan sosialisasi, workshop, seminar dan bimbingan teknis Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara membawahi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara

Tugas pokok Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil

Negara adalah menyiapkan dan melaksanakan mutasi serta promosi aparatur berdasarkan evaluasi jabatan, kesesuaian kompetensi, kualifikasi, kinerja dan rekam jejak jabatan, menyusun pelaksanaan proses kenaikan pangkat PNS serta koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan seleksi jabatan

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara

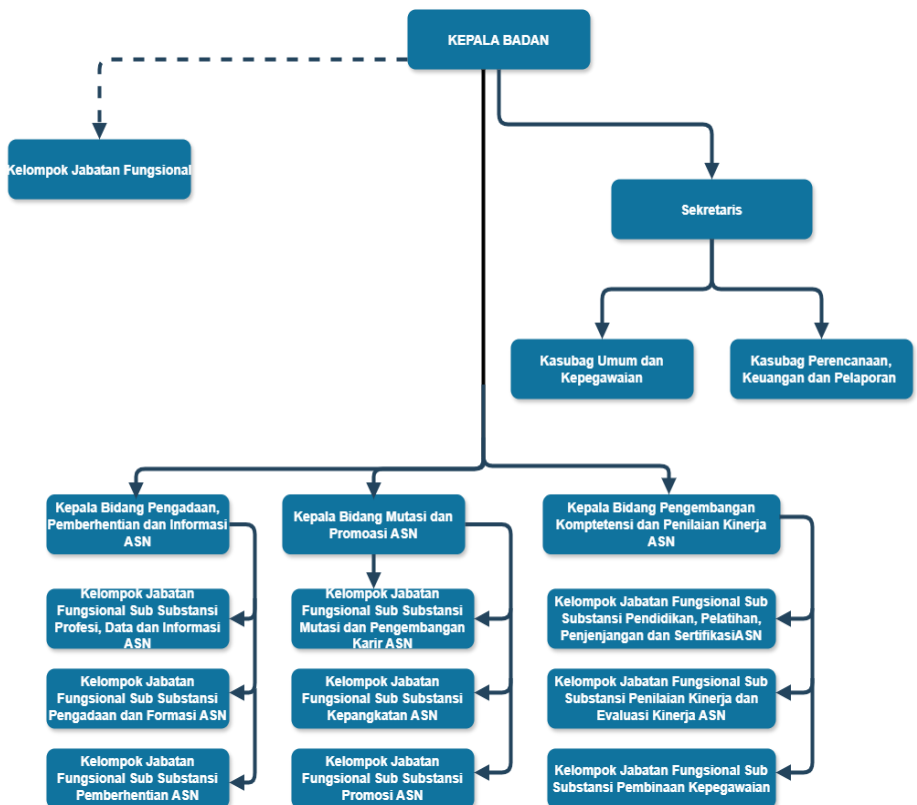
Tugas pokok Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja adalah Menyusun kebijakan tentang disiplin dan penghargaan. Menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta menyeleksi persyaratan pegawai yang mengajukan perceraian dan pernikahan, dan melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai yang akan mengikuti tugas belajar atau diklat fungsional dan kepemimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas kelompok jabatan fungsional mencakup pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pelayanan fungsional, yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang unit kerja masing-masing. Pejabat fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIR SELATAN
(Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2024)



B. VISI MISI KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. VISI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, adalah: ***“Mewujudkan Pesisir Selatan yang Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat, Didukung oleh Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”***. Filosofi yang terkandung dalam visi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

SEJAHTERA : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

MAJU : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, professional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, serta memiliki wawasan kedepan.

BERMARTABAT : Kehidupan Berbangsa dan

- bernegara bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK.
- AKUNTABEL** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas Tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- PROFESIONAL** : Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

2. MISI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Misi merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah. Misi pembangunan daerah dalam RPJP Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebagai berikut:

-
- | | |
|--------|---|
| Misi 1 | Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. |
| Misi 2 | Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. |
| Misi 3 | Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah. |
| Misi 4 | Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang nyaman dan berkesan. |
| Misi 5 | Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing. |
| Misi 6 | Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertasm dan dinamis. |

Misi yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM sebagai pengelola aparatur pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah misi pertama, yaitu :
“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi selaras dengan visi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BKPSDM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dapat mengoptimalkan potensi ASN, meningkatnya kompetensi, dan menjamin pengelolaan sumber daya manusia yang transparan dan akuntabel.

Sebagai bagian dari misi yang mendukung visi tersebut, BKPSDM akan mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memfasilitasi kolaborasi antar ASN.

Melalui upaya ini, BKPSDM tidak hanya berperan sebagai pengelola kepegawaian, tetapi juga sebagai pendorong perubahan dalam birokrasi, yang akan mendukung pencapaian tujuan jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. **Peningkatan Kualitas Pelayanan** : Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan standar yang lebih tinggi.
- b. **Pengembangan Kompetensi ASN** : Melaksanakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- c. **Pengelola SDM yang Efektif** : Meningkatkan system pengelolaan sumber daya manusia yang lebih transparan dan akuntabel.
- d. **Evaluasi dan Pengawasan Kinerja** : Mengimplementasikan system evaluasi dan pengawasan kinerja yang berkelanjutan untuk semua ASN.
- e. **Penerapan Teknologi Informasi** : Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan kepegawaian dan pelayanan publik.

BAB III

DESKRIPSI ASN KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. GAMBARAN UMUM ASN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pesisir Selatan berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik dan menjalankan fungsi pemerintahan yang efisien. Dengan komitmen untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel, ASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Sejalan dengan upaya ini, untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Kemasyarakatan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Perda tersebut, Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Sekretaris Daerah yang mencakup 3 (tiga) Asisten, 10 (sepuluh) Bagian, Sekretariat DPRD, 16 (enam belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Inspektorat Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, 2 (dua) RSUD serta 15 (lima belas) Kecamatan. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
 - 1.1 Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra (Asisten I)
 - 1.2 Asisten Bidang Perekonomian dan Pembngnan (Asisten II)
 - 1.3 Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III)
 - 1.4 Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
 - 1.5 Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan
 - 1.6 Kepala Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerja Sama
 - 1.7 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

- 1.8 Kepala Bagian Hukum
- 1.9 Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
- 1.10 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
- 1.11 Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
- 1.12 Kepala Bagian Umum
- 1.13 Kepala Bagian Organisasi
- 1.14 Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
- 1.15 Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan
 - 4.1 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 - 4.2 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - 4.3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 4.4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 4.5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas
 - 5.1 Dinas Kesehatan
 - 5.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-
- 5.3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 5.5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - 5.6 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - 5.7 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 5.8 Dinas Pertanian
 - 5.9 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
 - 5.10 Dinas Perikanan Dan Pangan
 - 5.11 Dinas Perhubungan
 - 5.12 Dinas Komunikasi Dan Informatika
 - 5.13 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup
 - 5.14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Tenaga Kerja
 - 5.15 Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi
 - 5.16 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
 6. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
 7. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
 8. Rumah Sakit Umum Daerah Tapan
 9. Kecamatan

- 9.1 Kantor Camat Koto XI Tarusan
- 9.2 Kantor Camat Bayang
- 9.3 Kantor Camat IV Nagari Bayang
Utara
- 9.4 Kantor Camat IV Jurai
- 9.5 Kantor Camat Batang Kapas
- 9.6 Kantor Camat Sutera
- 9.7 Kantor Camat Lengayang
- 9.8 Kantor Camat Ranah Pesisir
- 9.9 Kantor Camat Linggo Sari Baganti
- 9.10 Kantor Camat Airpura
- 9.11 Kantor Camat Pancung Soal
- 9.12 Kantor Camat Ranah Ampek Hulu
Tapan
- 9.13 Kantor Camat Basa Ampek Balai
Tapan
- 9.14 Kantor Camat Lunang
- 9.15 Kantor Camat Silaut

Jumlah Aparatur Sipil Negara se-Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan data yang terupdate sampai dengan Desember 2024 yaitu sebanyak 8.948 orang dengan rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 5.239 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3709 orang. Dengan

mengesampingkan status kependudukan ASN, jumlah ASN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 mencapai 1,73% dari total populasi sebesar 533.786 jiwa. Secara garis besar, maka profil Pegawai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat digambarkan, sebagai berikut:

Gambar 1. PROFIL ASN KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN 2024



B. KOMPOSISI ASN KAB. PESISIR SELATAN

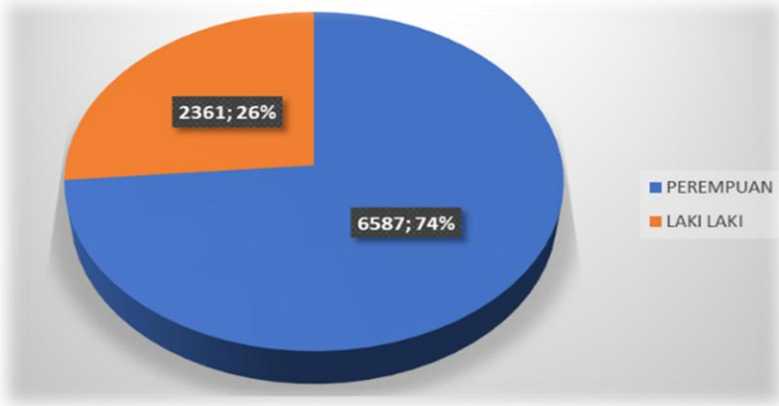
Komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut: Berdasarkan Jenis Kelamin Komposisi perbandingan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenis kelamin seperti tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Jenis Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Perempuan	Laki-Laki	
1	PNS	3.619	1.620	5.239
2	PPPK	2.968	741	3.709
Total ASN		6.587	2.361	8.948

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh perempuan, yang mencapai 73,61% dari total jumlah ASN yang ada. Sebaliknya, ASN laki-laki hanya mencapai 26,38%. Perbandingan ini dapat dilihat secara jelas pada grafik di bawah ini.

Grafik 1
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024



1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Komposisi data ASN menurut jenjang pendidikan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2024 masih didominasi oleh lulusan Sarjana (S1). Untuk melihat lebih detail mengenai komposisi dan perbandingan jumlah ASN Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

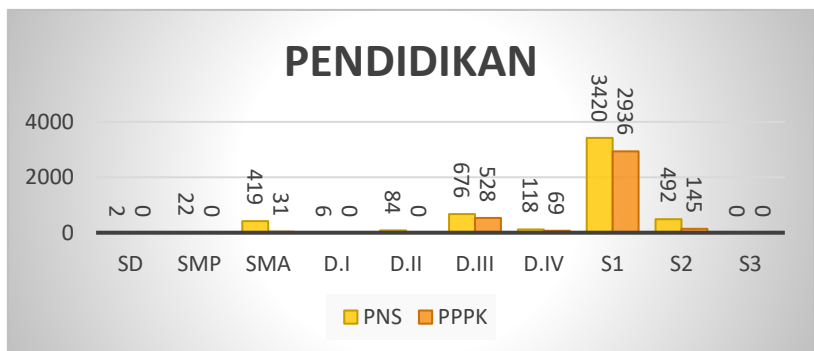
Tabel 2
Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

Pendidikan	PNS		PPPK		Total
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	
SD	1	1	-	-	2
SMP	3	19	-	-	22
SMA	170	249	12	19	450
Diploma I	5	1	-	-	6
Diploma II	54	30	-	-	84
Diploma III	600	76	462	66	1204
Diploma IV	95	23	64	5	187
S1	2442	978	2312	624	6356
S2	249	243	118	27	637
S3			-	-	-
Total ASN	3.619	1.620	2.968	741	8948

Jumlah ASN dengan jenjang pendidikan S1 mencapai 6.356 (71,03%), diikuti oleh jenjang D.IV sebanyak 187 orang (2,09%). Pada posisi berikutnya sebanyak 1.204 orang (13,46%) dengan jenjang pendidikan Diploma

III, ASN dengan jenjang Pendidikan S2 berjumlah 637 (7,12%). Sementara sebanyak 450 orang (5,03%) berpendidikan SMA. Disusul oleh jenjang Pendidikan Diploma II sebanyak 84 orang (0,94%). Adapun ASN dengan jenjang pendidikan SMP sederajat sebanyak 22 orang (0,25%), Diploma I sebanyak 6 orang (0,07%), dan yang terakhir pada jenjang pendidikan SD sederajat sebanyak 2 orang atau (0,02%). Untuk memperjelas perbandingan Jumlah ASN berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2
Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024



Dari gambar grafik 2, dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan ASN di Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lulusan S1, yang mencapai 71,03% dari total ASN. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

2. Berdasarkan Golongan Ruang

Komposisi perbandingan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan berdasarkan golongan dan pangkat dapat dilihat pada tabel berikut:

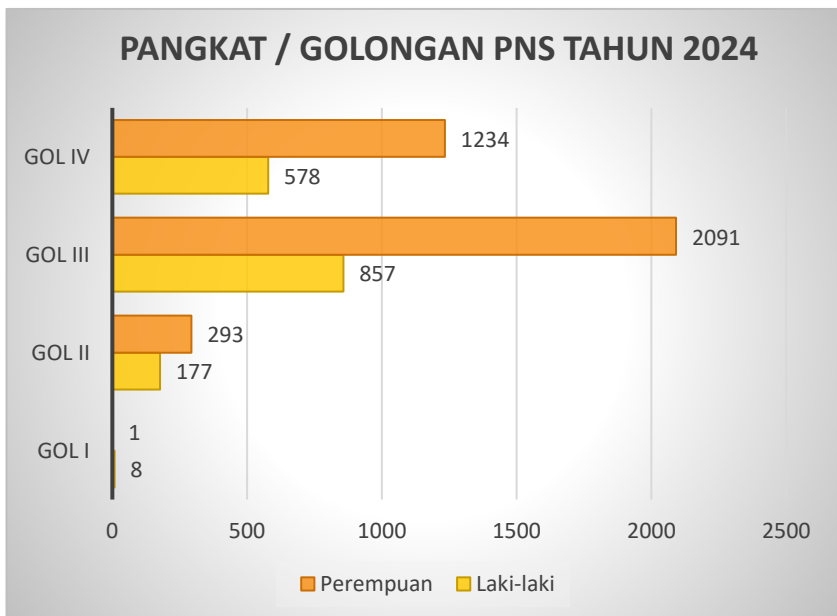
Tabel 3
Jumlah PNS Berdasarkan
Golongan Ruang Tahun 2024

Golongan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
I/a	0	0	0
I/b	0	0	0
I/c	1	1	2
I/d	0	7	7
II/a	3	4	7
II/b	12	29	41
II/c	89	63	152
II/d	189	81	270
III/a	278	182	460
III/b	473	184	657
III/c	401	152	553
III/d	939	339	1.278
IV/a	478	250	728
IV/b	609	236	845
IV/c	147	90	237
IV/d	0	2	2
IV/e	0	0	0
Jumlah	3.619	1.620	5.239

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per Desember Tahun 2024 masih didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III sebanyak 2.948 orang atau

56,27%. Kemudian diikuti oleh Pegawai Golongan IV sebanyak 1.812 orang atau setara dengan 34,59%, Golongan II sebanyak 470 orang atau 8,97% dan yang terkecil Golongan I sebanyak 9 orang atau setara dengan 0,17%. Perbandingan PNS Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada grafik di berikut:

Grafik 3
Jumlah PNS Berdasarkan
Pangkat/Golongan Tahun 2024



Grafik 3 menunjukkan bahwa mayoritas PNS di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada golongan yang lebih tinggi di golongan III, yang berimplikasi pada peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik. Selain PNS yang telah disebutkan di atas Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis, dengan rincian sebagai berikut:

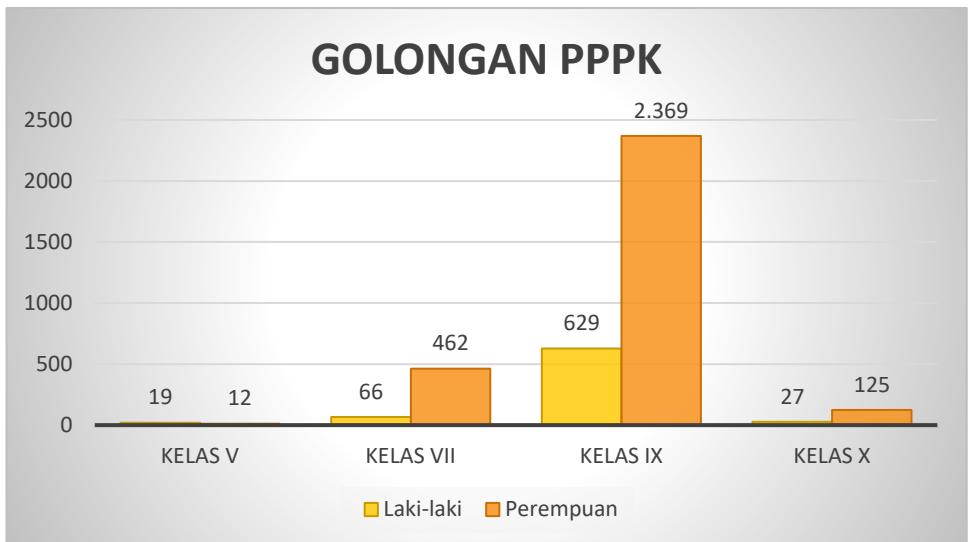
Tabel 4
Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan
Tahun 2024

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kelas V	19	12	31
Kelas VII	66	462	528
Kelas IX	629	2.369	2.998
Kelas X	27	125	152
Jumlah	741	2.968	3.709

Berdasarkan tabel 4, PPPK Golongan IX menduduki posisi terbanyak dengan jumlah sekitar 2.998 orang, atau setara dengan

80,83%, dikarenakan banyak yang telah memiliki pendidikan S1. Posisi kedua diisi oleh Golongan VII dengan 528 orang, atau 14,24%, diikuti oleh Golongan X dengan 152 orang, atau 4,10%. Terakhir, Golongan V sebanyak 31 orang, atau 0,84%. Perbandingan PPPK Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4
Jumlah PPPK berdasarkan golongan
Tahun 2024



3. Berdasarkan Jenis Jabatan

Komposisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

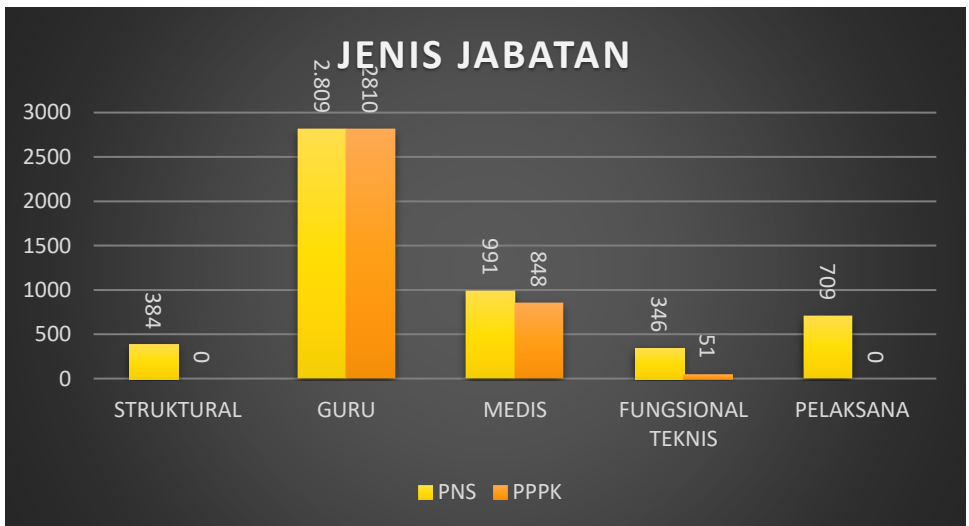
Tabel 5
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan
Tahun 2024

JABATAN	PNS	PPPK	JUMLAH
STRUKTURAL	384	-	384
GURU	2.809	2.810	5.619
MEDIS	991	848	1.839
FUNGSIONAL TEKNIS	346	51	397
PELAKSANA	709	-	709
JUMLAH	5.239	3.709	8.948

Dari data yang ditampilkan pada tabel, dapat dilihat bahwa ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2024 masih didominasi oleh ASN dengan jabatan guru sebanyak 5.619 orang, atau 62,80%. Kemudian diikuti oleh pemangku jabatan fungsional medis

sebanyak 1.839 orang, setara dengan 20,55%, pemangku jabatan pelaksana sebanyak 709 orang, atau 7,92%, pemangku jabatan fungsional teknis sebanyak 397 orang, atau 4,44%, dan yang terkecil, pemangku jabatan struktural sebanyak 384 orang, setara dengan 4,29%. Perbandingan ASN Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 5
Jumlah ASN berdasarkan jenis jabatan
Tahun 2024



4. Berdasarkan Jabatan Eselonering

Data pegawai yang dikelompokkan berdasarkan jabatan eselonering memberikan gambaran tentang sebaran dan jumlah pegawai yang menduduki posisi kepemimpinan di berbagai tingkatan birokrasi, serta komposisi jabatan struktural pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Komposisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan jenis jabatan eselonering dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan
Eselonering Tahun 2024

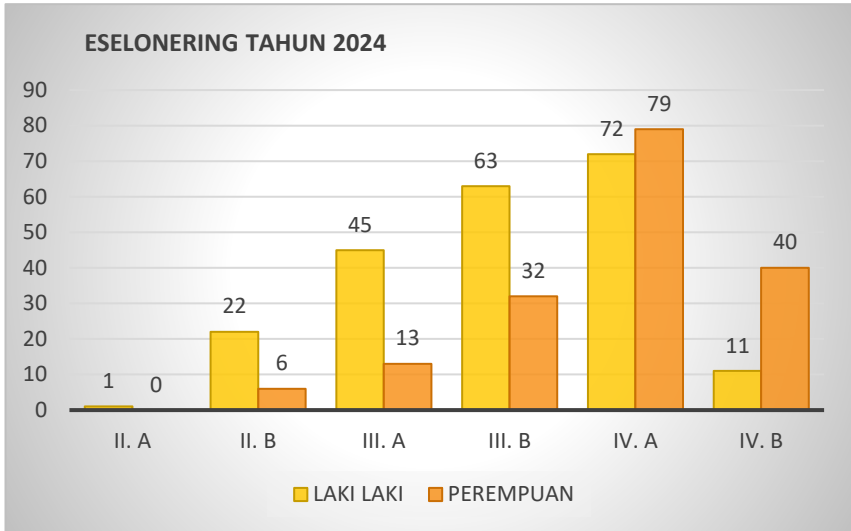
ESELONERIN G	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
II. A	1	0	1
II. B	22	6	28
III. A	45	13	58
III. B	63	32	95
IV. A	72	79	151
IV. B	11	40	51
JUMLAH	206	168	384

Berdasarkan tabel di atas, distribusi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pesisir Selatan menurut eselonering didominasi oleh Pejabat Eselon IV, dengan jumlah 202 orang (52,62%). Pejabat Eselon IV dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 119 orang atau 30,99%, sedangkan laki-laki berjumlah 83 orang atau 21,61%. Selanjutnya, Pejabat Eselon III didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 108 orang atau 28,13%, sedangkan perempuan berjumlah 45 orang atau 11,72%, dengan total Pejabat Eselon III sebanyak 153 orang (39,84%). Adapun Pejabat Eselon II juga didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah 23 orang atau 5,99%, sementara perempuan berjumlah 6 orang atau 1,56%, sehingga total Pejabat Eselon II mencapai 30 orang (7,55%). Perbandingan PNS Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jabatan eselonering dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 6

Jumlah PNS berdasarkan jabatan Eselonering Tahun 2024



Berdasarkan data distribusi PNS di Kabupaten Pesisir Selatan menurut eselonering, dapat disimpulkan bahwa mayoritas jabatan struktural dipegang oleh Pejabat Eselon IV, dengan proporsi tertinggi didominasi oleh perempuan. Sebaliknya, Pejabat Eselon III dan Eselon II lebih banyak diisi oleh laki-laki.

5. Berdasarkan rentang usia

a. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan

rentang usia

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 menunjukkan distribusi yang beragam berdasarkan rentang usia. Pembagian ini memberikan gambaran mengenai tingkat regenerasi pegawai, potensi pensiun, serta kebutuhan perencanaan SDM yang lebih strategis.

Tabel 7
Jumlah PNS Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2024

USIA	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
20-24 Tahun	2	0	2
25-29 Tahun	24	64	88
30-34 Tahun	71	143	214
35-39 Tahun	121	483	604
40-44 Tahun	229	614	843
45-49 Tahun	233	520	753
50-54 Tahun	322	642	964
55-60 Tahun	618	1.153	1.771
Jumlah	1.620	3.619	5.239

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2024, jumlah total Pegawai Negeri

Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 5.239 orang, yang terdiri dari 1.620 laki-laki dan 3.619 perempuan. Jika dilihat dari distribusi usia, terlihat bahwa mayoritas PNS berada dalam kelompok usia menengah hingga mendekati pensiun. Kelompok usia 55–60 tahun merupakan yang terbanyak, yaitu 1.771 orang (618 laki-laki dan 1.153 perempuan), atau sekitar **33,8% dari total PNS**.

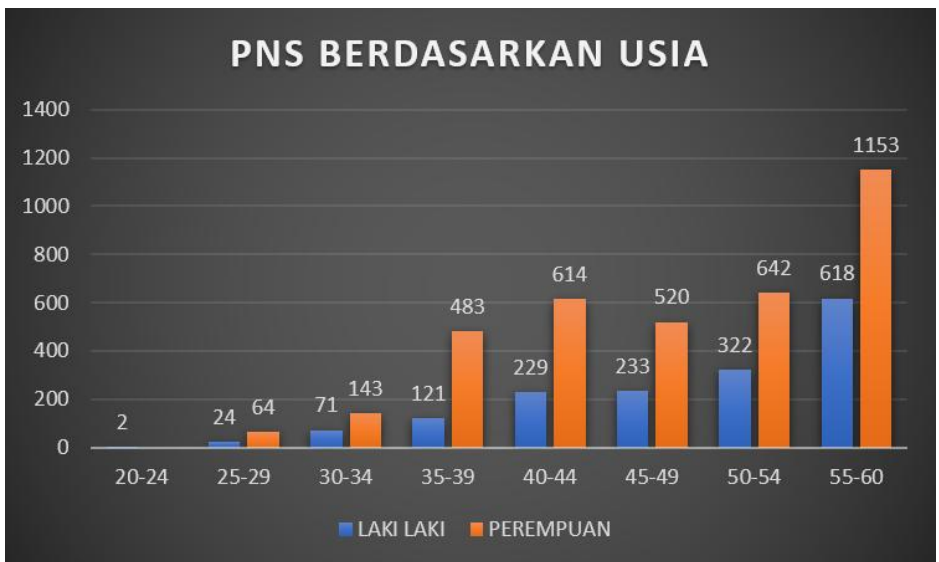
Dominasi usia ini menunjukkan bahwa dalam waktu dekat akan terjadi gelombang pensiun yang cukup besar, sehingga perlu diantisipasi dengan perencanaan regenerasi SDM secara bertahap dan terukur. Disusul oleh kelompok usia 50–54 tahun dengan jumlah 964 orang (322 laki-laki dan 642 perempuan), serta 45–49 tahun sebanyak 753 orang (233 laki-laki dan 520 perempuan). Bila digabungkan, tiga kelompok usia ini (45–60 tahun)

mencakup sekitar 69,2% dari total PNS, menandakan dominasi PNS yang berada dalam fase akhir masa kerja. Sementara itu, kelompok usia produktif menengah, yaitu 40–44 tahun, berjumlah 843 orang (229 laki-laki dan 614 perempuan), dan 35–39 tahun sebanyak 604 orang (121 laki-laki dan 483 perempuan). Mereka merupakan calon pemimpin dan penggerak birokrasi di masa transisi, serta menjadi sasaran utama dalam program pengembangan kompetensi dan kepemimpinan. Di sisi lain, kelompok usia muda relatif masih sedikit. Usia 30–34 tahun tercatat 214 orang, 25–29 tahun sebanyak 88 orang, dan usia 20–24 tahun hanya 2 orang. Ketiga kelompok ini hanya mencakup sekitar 6,1% dari total PNS, yang menandakan terbatasnya rekrutmen baru dalam beberapa tahun terakhir.

Secara keseluruhan, distribusi usia PNS tahun 2024 menunjukkan struktur yang didominasi oleh pegawai usia tua.

Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen kepegawaian yang proaktif, terutama dalam aspek regenerasi, alih pengetahuan (knowledge transfer), dan percepatan peningkatan kapasitas pegawai muda agar roda birokrasi tetap berjalan optimal dan berkelanjutan.

Grafik 7
Jumlah PNS berdasarkan rentang usia
Tahun 2024



Berdasarkan grafik distribusi PNS tahun 2024, struktur kepegawaian

didominasi oleh kelompok usia tua, dengan lebih dari 52% pegawai berada pada rentang usia 50–60 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Proporsi PNS usia muda tergolong rendah, di mana kelompok usia di bawah 35 tahun hanya mencakup kurang dari 7% dari total pegawai. Sementara itu, distribusi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi pegawai perempuan di hampir seluruh kelompok usia, terutama pada usia produktif hingga menjelang masa pensiun.

b. PPPK Berdasarkan Rentang Usia

Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 berdasarkan rentang usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8
Jumlah PPPK Berdasarkan Rentang
Usia Tahun 2024

USIA	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
20-24 Tahun	2	14	16
25-29 Tahun	133	697	830
30-34 Tahun	244	863	1107
35-39 Tahun	199	700	899
40-44 Tahun	88	369	457
45-49 Tahun	29	166	195
50-54 Tahun	27	109	136
55-60 Tahun	19	50	69
Jumlah	741	2968	3709

Berdasarkan data Tahun 2024, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) didominasi oleh kelompok usia 30–34 tahun sebanyak 1.107 orang, disusul kelompok usia 35–39 tahun sebanyak 899 orang, dan usia 25–29 tahun sebanyak 830 orang. Sementara itu, jumlah PPPK pada rentang usia 40–44 tahun tercatat sebanyak 457 orang, usia 45–49 tahun sebanyak 195 orang, usia 50–54 tahun sebanyak 136 orang, dan usia 55–60 tahun sebanyak 69

orang. Adapun kelompok usia termuda, yakni 20–24 tahun, berjumlah 16 orang. Visualisasi distribusi jumlah PPPK berdasarkan rentang usia tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 8
Jumlah PPPK Berdasarkan
Rentang Usia Tahun 2024



Grafik 8 menunjukkan distribusi jumlah PPPK di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin.

Terlihat bahwa kelompok usia 30–34 tahun memiliki jumlah terbanyak, yaitu 244 laki-laki dan 863 perempuan. Disusul oleh kelompok usia 35–39 tahun (199 laki-laki dan 700 perempuan) serta 25–29 tahun (133 laki-laki dan 697 perempuan). Sebaliknya, jumlah PPPK paling sedikit berada pada kelompok usia 20–24 tahun (2 laki-laki dan 14 perempuan) dan 55–60 tahun (19 laki-laki dan 50 perempuan). Secara keseluruhan, jumlah PPPK perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki di semua rentang usia.

6. MUTASI ASN

Pada Tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan dimaksud mencakup antara lain: Mutasi Cuti di Luar Tanggungan Negara; Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); Mutasi pindah keluar wilayah kerja; Mutasi pindah masuk

ke wilayah kerja; Mutasi pindah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Pesisir Selatan; Mutasi pemberhentian; Mutasi pensiun. Keadaan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan maupun penyusutan jumlah, serta perubahan komposisi ASN, sebagaimana tercermin dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tabel 9
Jenis Mutasi ASN Tahun 2024

No	Jenis Mutasi	Jumlah
1.	Cuti diluar Tanggungan Negara	0 orang
2.	Pensiun BUP	329 orang
3.	Pensiun Atas Permintaan Sendiri	6 orang
4.	Meninggal Dunia	33 orang
5.	Mutasi Pindah Masuk	16 orang
6.	Mutasi Pindah Keluar	22 orang
7.	PPPK Formasi 2023	2.015 orang
8.	Pemberhentian Pegawai	1 orang

a. ASN Mencapai Batas Usia Pensiun

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki batas usia pensiun yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan

batas tersebut bervariasi tergantung pada jenis jabatan yang diemban oleh masing-masing ASN. Di Kabupaten Pesisir Selatan, PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2024 tercatat sebanyak 323 orang sedangkan PPPK sebanyak 6 orang. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai jumlah ASN yang pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Jumlah ASN yang mencapai Batas Usia Pensiun Tahun 2024

Jabatan	PNS	PPPK	Jumlah
Pelaksana	62	0	62 orang
Fungsional Teknis	11	5	16 orang
Guru/Pengawas	223	1	224 orang
Tenaga Kesehatan	10	0	10 orang
Struktural	17	0	17 orang
Jumlah	323	6	329 orang

Jumlah ASN yang pensiun paling banyak didominasi oleh jabatan guru sebanyak 224 orang atau sebesar (68%),

diikuti oleh jabatan pelaksana sebanyak 62 orang atau sebesar (19%), selanjutnya jabatan fungsional teknis dan struktural masing masing sebanyak 11 orang dan 17 orang atau sebesar (5%), terakhir tenaga Kesehatan sebanyak 10 orang atau sebesar (3%).

b. Pensiun Atas Permintaan Sendiri

ASN yang mengajukan Pensiun Atas Permintaan Sendiri Di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 6 orang dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Jumlah ASN Pensiun Atas
Permintaan Sendiri Tahun 2024

Jabatan	PNS	PPPK	Jumlah
Pelaksana	1	0	1 orang
Fungsional Teknis	0	0	0 orang
Guru/Pengawas	4	0	4 orang
Tenaga Kesehatan	1	0	1 orang
Struktural	0	0	0 orang
Jumlah	6	0	6 orang

Pemberhentian atas permintaan sendiri

merupakan salah satu bentuk berakhirnya masa kerja bagi Aparatur Sipil Negara yang didasarkan pada kehendak pribadi pegawai. Pada umumnya, PNS yang memilih pensiun atas permintaan sendiri didorong oleh kondisi kesehatan yang tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan tugas dan fungsi jabatannya secara optimal.

c. Pensiun Janda Duda

ASN yang meninggal dunia pada tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12
Jumlah ASN Pensiun Janda Duda
Tahun 2024

Jabatan	PNS	PPPK	Jumlah
Pelaksana	5	0	5
Fungsional Teknis	3	1	4
Guru/Pengawas	16	2	18
Tenaga Kesehatan	3	0	3
Struktural	3	0	3
Jumlah	30	3	33

Tabel 12 menunjukkan distribusi ASN

pensiun janda/duda pada tahun 2024 berdasarkan jabatan terakhir. Secara keseluruhan terdapat 33 ASN yang meninggal dunia, terdiri dari 30 orang PNS dan 3 orang PPPK. Kelompok Guru/Pengawas sebanyak 18 orang, selanjutnya, pada jabatan Pelaksana tercatat 5 orang, kemudian Fungsional Teknis sebanyak 4 orang. Adapun Tenaga Kesehatan dan Struktural masing-masing berjumlah 3 orang.

d. Mutasi Pindah Masuk

Mutasi pindah masuk hanya berlaku bagi PNS, karena berdasarkan ketentuan yang berlaku PPPK tidak dapat dimutasi antar instansi. Mutasi pindah masuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 13
Jumlah PNS Pindah Masuk Tahun 2024

Jabatan	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Pelaksana	0	0	0
Fungsional Teknis	2	3	5
Guru/Pengawas	3	4	7
Tenaga Kesehatan	4	0	4
Struktural	0	0	0
Jumlah	9	7	16

Mutasi pindah masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 menunjukkan total perpindahan sebanyak 16 orang. Berdasarkan kelompok jabatan, data menunjukkan bahwa mutasi didominasi oleh formasi tenaga pendidik, dengan Guru/Pengawas menjadi kelompok terbesar, yaitu sebanyak 7 orang. Sementara itu, PNS yang menempati Jabatan Fungsional Teknis menyumbang 5 orang. Sisanya, sebanyak 4 orang, mengisi kebutuhan di posisi Jabatan tenaga kesehatan.

e. Mutasi Pindah Keluar

Mutasi pindah keluar PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Jumlah PNS Pindah Keluar Tahun 2024

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pelaksana	0	0	0
Fungsional Teknis	8	4	12
Guru/Pengawas	2	4	6
Tenaga Kesehatan	0	4	4
Struktural	0	0	0
Jumlah	10	12	22

Pada tahun 2024, total **22 orang** PNS tercatat melakukan mutasi pindah keluar dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kelompok **Fungsional Teknis** menjadi penyumbang terbesar dengan 12 orang, diikuti oleh **tenaga Guru** sebanyak 6 orang. Sementara itu, **tenaga Kesehatan** juga turut pindah sebanyak 4 orang.

7. INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Indeks ini dibangun dari 4 Dimensi, yaitu Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimeensi Kinerja dan Dimensi Disiplin.

Tabel 15
Nilai IP-ASN Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2023-2024

Dimensi	2023	2024
Kualifikasi	20,57	20,76
Kompetensi	29,30	30,75
Kinerja	24,86	25,90
Disiplin	5,00	5,00
IP-ASN	79,73	82,41

Nilai IP-ASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah 82,41 poin. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Ini memperlihatkan komitmen

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan profesionalitas ASN sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

8. PERBANDINGAN ANTAR DAERAH

Untuk melihat bagaimana kondisi kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Data kepegawaian dari daerah lain bersumber dari buku kabupaten/kota dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Dari segi jumlah, ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menempati urutan ketiga terbanyak dibandingkan pemerintah daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan daerah yang memiliki ASN dengan jumlah terbanyak di tahun 2024 yaitu mencapai 10.437 orang. Sementara itu, wilayah

yang jumlah ASN paling sedikit adalah Kota Padang Panjang dengan total 2.047 orang di tahun 2024.

Tabel 16
Perbandingan Jumlah ASN antar
Wilayah dan Rasio per 1000 orang
Penduduk

Kode	Kab/Kota	ASN	Penduduk	Rasio
13.01	Pesisir Selatan	8.948	532,91	0,0596
13.02	Solok	5.280	410,43	0,0777
13.03	Sijunjung	4.737	246,78	0,0521
13.04	Tanah Datar	5.827	388,23	0,0666
13.05	Padang Pariaman	6.774	459,17	0,0678
13.06	Agam	5.412	559,30	0,1033
13.07	Lima Puluh Kota	7.134	401,09	0,0562
13.08	Pasaman	4.494	318,08	0,0708
13.09	Mentawai	3.360	92,76	0,0276
13.10	Dharmasraya	4.593	244,03	0,0531
13.11	Solok Selatan	3.711	195,03	0,0526
13.12	Pasaman Barat	6.083	456,47	0,0750
13.71	Kota Padang	10.437	954,18	0,0914
13.72	Kota Solok	2.213	79,46	0,0359
13.73	Kota Sawahlunto	2.683	68,73	0,0256
13.74	Kota Padang Panjang	2.047	59,45	0,0290
13.75	Kota Bukittinggi	2.771	125,02	0,0451
13.76	Kota Payakumbuh	3.170	146,73	0,0463
13.77	Kota Pariaman	3.023	98,34	0,0325

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, profil Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menggambarkan tentang struktur kepegawaian, komposisi demografis, tingkat pendidikan, dan distribusi jabatan pegawai. Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan pada data kepegawaian sebagai berikut :

1. Berdasarkan data komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pesisir Selatan, proporsi ASN perempuan mencapai 73,61% dari total ASN, sedangkan proporsi ASN laki-laki hanya sebesar 26,38%. Hal ini mencerminkan perbedaan yang signifikan dalam komposisi ASN, di mana jumlah perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.
2. Berdasarkan data jenjang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pesisir

Selatan, sebagian besar ASN memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dengan lulusan S1 sebagai jenjang pendidikan yang paling dominan, yaitu sebesar 71,03% dari total ASN. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar ASN di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kualifikasi akademis yang sesuai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan secara profesional.

3. Berdasarkan data komposisi golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2024, sebagian besar PNS berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 2.948 orang atau 56,27% dari total PNS. Jumlah ini menunjukkan bahwa sebagian besar PNS di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada jenjang golongan yang mencerminkan kualifikasi dan pengalaman yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan PNS.
4. Berdasarkan data komposisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2024, mayoritas ASN menduduki jabatan sebagai

guru, dengan jumlah 5.619 orang atau 62,80% dari total ASN. Data ini menggambarkan distribusi jabatan ASN yang lebih berfokus pada pelayanan pendidikan.

B. SARAN

Berdasarkan profil Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah disajikan, berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan yang lebih proaktif dalam proses seleksi jabatan, di mana aspek pendidikan dan kompetensi harus menjadi prioritas utama dalam penunjukan pejabat struktural.
2. Penting untuk menyediakan pelatihan lanjutan dan pendidikan profesional bagi ASN dan fokus pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, guna meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan.

3. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap distribusi jabatan ASN, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan. Dapat dipertimbangkan untuk mengisi jabatan lain dan mendorong ASN untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang, bukan hanya sebagai guru.

Implementasi saran-saran tersebut diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih seimbang, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).